



UNIVERSITAS DIPONEGORO

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil KORUPSI di Indonesia, (Malang: Bayumedia, 2005).

Abdul Latif, Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).
_____, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

D.Schaffmeister, Hukum Pidana (cetakan kedua), Terjemahan oleh J.E.Sahetapy, (Yogyakarta: Liberty, 2003).

I.G.M. Nurdjana, Korupsi dalam Praktik Bisnis, Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

_____, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Indroharto, Usaha memahami Undang-undang tentang PTUN Buku 1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000).

Irfan Fachrudin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, (Bandung: Alumni, 2004).

Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2014).

Kartini Katono, Pengantar Metodologi Research, (Jakarta: UI-Press, 1984).

Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis Praktik dan Masalahnya, (Bandung: Alumni, 2007).

Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, Perihal Negara, Hukum & Kebijakan Publik, (Malang: Setara Press, 2012).

Mardjono Reksodiputro, Ceramah : “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi”, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi Fakultas Hukum Undip, (Semarang, 23-24 November, 1989).

Mawardi, Irvan, Paradigma Baru PTUN Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016).

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Muhammad Yasin dkk, Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Depok: Universitas Indonesia-Center for Study of Governance and Administrative Reform, 2017).

Nawawi, Barda, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2005).

Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis tentang Birokrasi Negara, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010).

Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, (Surabaya: Laksbang Mediatama 2008).

OC Kaligis, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam Tugas Kedinasan (pasca UU No.30 Tahun 2014), (Bandung: PT Alumni, 2015).

_____, Korupsi Bibit & Chandra, (Jakarta: Indonesia Against Injustice, 2010).

Pantja Astawa, Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia, (Bandung:Alumni, 2008).

Philipus M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).

_____, Hukum Administrasi dan Good Governance, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010).

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014).

Ridwan, Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).

_____, Persinggungan Antar Bidang Hukum dalam Perkara Korupsi, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016).

Rohim, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, (Depok: Pena Mukti Media, 2008).

Roni Hanintjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982).

S Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, (Jakarta: PT Ichtiar Baru,1999).

Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi,(Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008).

Salman Luthan, Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan,(Yogyakarta; FH UII Press, 2014).

S.F. Marbun, Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1997).

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986).

Soerjono Soekanto dalam Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986).

Tri Cahya Indra P, Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, (Yogyakarta: Genta Press, 2016).

B. JURNAL DAN SKRIPSI

Marzuki, Laica, Makalah dalam Seminar Ikatan Hakim Indonesia: (UU AP: menguatkan atau memperlemah Pemberantasan Korupsi?), (Jakarta, 2015).

Moch Iqbal, Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik, (Jurnal Hukum dan Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 2014).

Nirwanto D, Andhi, Makalah dalam Seminar Ikatan Hakim Indonesia: (Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), (Jakarta, 2015).

Parmono, Budi, Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, (Malang: Disertasi Program Doktorat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011).

Romli Atmasasmita, Makalah dalam Seminar Ikatan Hakim Indonesia: (UU AP: menguatkan atau memperlemah Pemberantasan Korupsi?), (Jakarta, 2015).

Sahlan, Mohammad, Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi, (Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM VOL 2 Universitas Islam Indonesia, 2016).

Sitorus, Santer, Slide Presentasi (PPT) dalam Sosialisasi Undang Undang Administrasi Pemerintahan, Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Jakarta, 2015).

Yulius, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), (Jurnal Hukum dan Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Volume 04 Nomor 3, 2015).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

D. WEBSITE

Transparency International, “Corruption Perceptions Index 2016:Results”, diakses https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016, pada tanggal 6 November 2017, Pukul 20.31